



DSD / ABM

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Daftar Isi

BAB 1	PENDAHULUAN	1-1
1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Gambaran Umum Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga	1-1
1.3	Tugas dan Fungsi	1-2
1.4	Isu Strategis	1-3
1.5	Landasan Hukum	1-3
1.6	Sistematika	1-3
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA.....	2-1
2.1	Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	2-1
2.1.1	Rencana Strategis	2-1
2.1.2	Indikator Kinerja Utama	2-2
2.1.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	2-1
2.2	Perencanaan Strategis Hasil Reviu	2-1
2.2.1	Rencana Strategis Hasil Reviu	2-1
2.2.2	Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	2-2
2.2.3	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	2-11
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	3-1
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	3-1
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	3-2
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	3-4
3.3.1.	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan.....	3-6
3.3.2.	Sasaran 2 Berkurangnya Genangan	3-1
3.3.3.	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM.....	3-1
3.3.4.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja.....	3-1
BAB 4	PENUTUP	4-1
4.1.	Kesimpulan.....	4-1
4.2.	Saran	4-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung yang beralamat di Jl. Cianjur No.34, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Pada tahun 2015 penamaan dinas ini diubah dari Dinas Bina Marga dan Pengairan menjadi Dinas Pekerjaan Umum

sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016. Pada Tahun 2021 penamaan Dinas ini berubah kembali menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, pergantian nama ini disertakan pula dengan pengalihan kewenangan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

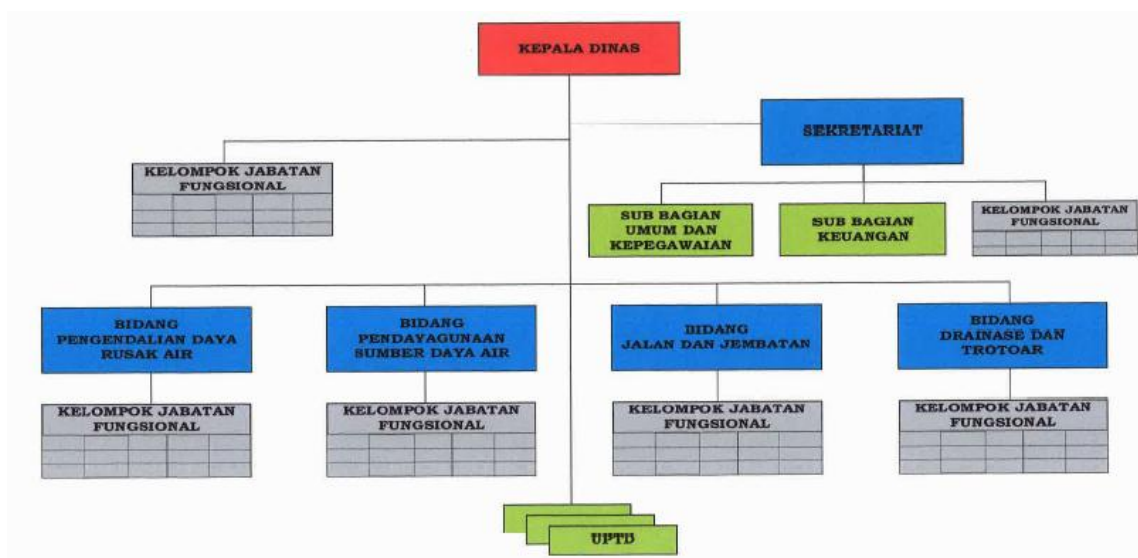
1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan lingkup sumber daya air dan bina marga;
- b) pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya air dan bina marga;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya air dan bina marga;
- d) pelaksanaan administrasi dinas lingkup sumber daya air dan bina marga; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung memiliki beberapa unit kerja yang masing-masing memiliki peran strategis sesuai dengan bidang tugasnya. Unit kerja pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung
Sumber: Perwal Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024

1.4 Isu Strategis

1. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur kebinamargaan untuk peningkatan kemantapan jalan dan kualitas trotoar
2. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan sistem drainase untuk penurunan genangan

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Nomor: TL.01.02/0533-DSDABM/2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Tahun 2024-2026 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	95.00	95.00	95.00
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	19.45	19.95	20.45
		Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	94.12	97.06	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.90	86.00	86.10

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Tingkat Kemantapan Jalan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan jalan ditinjau dari rasio antara panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kota x 100%	Lingkup pengukuran tingkat kemantapan jalan pada DSDABM berada pada ruas-ruas jalan kota dengan fungsi jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder. Jalan dengan fungsi jalan Lingkungan Sekunder merupakan lingkup kewenangan DPKP. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.883-DBMTR/2022 tentang Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan, dan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, maka perlu dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
				diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.		
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan trotoar ditinjau dari rasio antara panjang trotoar inklusif terhadap total panjang jalan. Yang dimaksud dengan trotoar inklusif adalah trotoar yang aksesibel bagi seluruh spektrum pedestrian, termasuk penyandang disabilitas, dimana trotoar telah dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, misalnya ramp dan ubin pemandu.	Panjang jalan kewenangan Kota yang memiliki trotoar inklusif / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kota x 100%	Lingkup pengukuran Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif adalah pada ruas-ruas jalan sebagaimana dijelaskan pada baris 1 kolom Keterangan / Kriteria di atas.
2	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	Persentase Pengurangan Titik Genangan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Berkurangnya Genangan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan	Jumlah titik genangan terselesaikan sesuai kriteria keberhasilan/jumlah titik genangan yang telah ditetapkan (68 titik) x 100%	Lingkup Pengukuran Persentase Pengurangan Titik Genangan adalah pada 68 titik genangan sebagai berikut:(1) Jl. Cikutra Barat-Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat); (2) Jl. Terusan Pasteur-S. Cianting (depan Hotel Topaz dan#38; BTC); (3) Terminal Leuwipanjang; (4) Jl.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
				<p>kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan infrastruktur SDA dan Sistem Drainase Perkotaan ditinjau dari rasio antara jumlah titik genangan terselesaikan (memenuhi kriteria keberhasilan) terhadap total jumlah titik genangan yang telah ditetapkan sebanyak 68 titik. Kriteria keberhasilan pengurangan titik genangan adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dengan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.</p>		<p>Pagarsih-S. Citepus; (5) Jalan Naripan/Sal. Cikapayang; (6) Persimpangan Jl. Soekarno Hatta-Jl. Rumah Sakit; (7) Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisolatri); (8) Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan; (9) Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I dan#38; Sal. Pembuang); (10) Fly Over Kiaracandong/Sal. Cibeunying; (11) Persimpangan Jl. Soekarno Hatta dan#38; Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol; (12) S. Cicendo Jl. Kebon Kawung; (13) Jl. Cipaganti-Jl. Setiabudi/Sal. Cikalintu; (14) Jalan Cibogo/Sal. Cibogo; (15) Jl. Prof. Eickman-Sal. Leuwilimus I; (16) Jl. Kopo-Sal. Citarip; (17) S. Citepus Jl. Arjuna; (18) Pusdai Jl. Suci/Sal. Lebak Larang; (19) Jl. Layang Cimindi/Gunung Batu (Sal. Ciwarga); (20) Sal. Cikapayang-Jl. Supratman-Cisokan; (21) Sal. Cikapayang-Gasibu; (22) Jl. Windu-Jl. Galunggung-Seskoed; (23) Jl. Sukamulya-S. Cipedes; (24) Jl. Sukahaji-Jl. Gegerkalong; (25) Pasar Sederhana Sal. Cikalintu; (26) S. Cikapundung Kolot-belakang TSM; (27) S. Cibunut-Pasar Kosambi; (28) S. Cibunut-Baranangsiang; (29) Sal. Lebak larang-UNPAD; (30) Jl. Moch. Toha-Sal. Ciplasari/Sal. Ciateul; (31) S. Cirangrang; (32) Jl. Nilem; (33) Sal. Ciborete-Alamanda; (34) S. Cijalupang-Leger Jalan; (35) Jl. Cibodas-antapani; (36) Jl. A.H. Nasution S. Cikiley; (37) Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I; (38) Jl. Dian Molek-Sal. Cibuntu; (39) Jl. Sukamaju/Jl. Cikaso S. Cibeunying; (40) Jl. Cilengkrang II Sal. Ciplasari; (41) Jl. Plered Sal. Antapani; (42) Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung; (43) SMA 9-Lapang Husen Sal. Cianting; (44) Sal. Ciharalang-S. Cidurian; (45)</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
						Jl. Ujung Beurung-Polresta Bandung Timur; (46) Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani-Jl. Jakarta; (47) Jl. Sumatra-SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa); (48) Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk; (49) Sal. Cikudapateuh-Jl. Kacaping, Jl. Gudang Utara; (50) Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung; (51) S. Cibeureum-Cigondewah/Gempolsari/Sudiplak; (52) Persimpangan Jl. Pasirkoja-Sal. Cilimus I; (53) Jl. Cibaduyut-Jl. Tol; (54) Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha; (55) Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta-Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga); (56) S. Ciroyom Jl. Kopo; (57) Simpang Jl. Jakarta-Jl. Kiaracandong; (58) Fly Over Jl. Cimindi; (59) Terusan Jl. Kiaracandong-Jl. Soekarno Hatta; (60) Sal. Cilimus Jl. Sukajadi; (61) S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga; (62) Sal. Mercuri Jl. Tata Surya dan#38; Jl. Mercuri; (63) Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih; (64) Sal. Rancabolang-Pasantren Jl. Rancabolang; (65) Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra; (66) S. Cipagalo; (67) S. Cipariuk; (68) Perumahan Riung Bandung.
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan DSDABM pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
				mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan DSDABM, yang diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat.		

2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	90.61
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	18.85
2	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	91.18
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.40

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Tahun 2025, sebagai berikut:

2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Tahun 2025. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh

dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain:

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2025 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	95,00	90,61	86,21
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18,85	18,85	19,13
		Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91,18	91,18	92,65
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,31	88,31	88,31

2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Tingkat Kemantapan Jalan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan jalan	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kota x 100%		Lingkup pengukuran tingkat kemantapan jalan pada DSDABM berada pada ruas-ruas jalan kota dengan fungsi jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder. Jalan dengan fungsi jalan Lingkungan Sekunder merupakan lingkup kewenangan DPKP. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.883-DBMTR/2022 tentang Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan, dan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, maka perlu dilakukan proses serah

				ditinjau dari rasio antara panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.			terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis	Panjang jalan kewenangan Kota yang memiliki trotoar inklusif / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kota x 100%		Lingkup pengukuran Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif adalah pada ruas-ruas jalan sebagaimana dijelaskan pada baris 1 kolom Keterangan / Kriteria di atas.

				<p>Meningkatnya Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan trotoar ditinjau dari rasio antara panjang trotoar inklusif terhadap total panjang jalan. Yang dimaksud dengan trotoar inklusif adalah trotoar yang aksesibel bagi seluruh spektrum pedestrian, termasuk penyandang disabilitas, dimana trotoar telah dilengkapi dengan fasilitas yang</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, misalnya ramp dan ubin pemandu.			
2	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	Persentase Pengurangan Titik Genangan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Berkurangnya Genangan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan infrastruktur	Jumlah titik genangan terselesaikan sesuai kriteria keberhasilan/jumlah titik genangan yang telah ditetapkan (68 titik) x 100%		Lingkup Pengukuran Persentase Pengurangan Titik Genangan adalah pada 68 titik genangan sebagai berikut:(1) Jl. Cikutra Barat-Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat); (2) Jl. Terusan Pasteur-S. Cianting (depan Hotel Topaz dan#38; BTC); (3) Terminal Leuwipanjang; (4) Jl. Pagarsih-S. Citepus; (5) Jalan Naripan/Sal. Cikapayang; (6) Persimpangan Jl. Soekarno Hatta-Jl. Rumah Sakit; (7) Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri); (8) Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan; (9) Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I dan#38; Sal. Pembuang); (10) Fly Over Kiaracandong/Sal. Cibeunying; (11) Persimpangan Jl. Soekarno Hatta dan#38; Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol; (12) S. Cicendo Jl. Kebon Kawung; (13) Jl. Cipaganti-Jl.

			<p>SDA dan Sistem Drainase Perkotaan ditinjau dari rasio antara jumlah titik genangan terselesaikan (memenuhi kriteria keberhasilan) terhadap total jumlah titik genangan yang telah ditetapkan sebanyak 68 titik. Kriteria keberhasilan pengurangan titik genangan adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dengan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan</p>		<p>Setiabudi/Sal. Cikalintu; (14) Jalan Cibogo/Sal. Cibogo; (15) Jl. Prof. Eickman-Sal. Leuwilimus I; (16) Jl. Kopo-Sal. Citarip; (17) S. Citepus Jl. Arjuna; (18) Pusdai Jl. Suci/Sal. Lebak Larang; (19) Jl. Layang Cimindi/Gunung Batu (Sal. Ciwarga); (20) Sal. Cikapayang-Jl. Supratman-Cisokan; (21) Sal. Cikapayang-Gasibu; (22) Jl. Windu-Jl. Galunggung-Seskoad; (23) Jl. Sukamulya-S. Cipedes; (24) Jl. Sukahaji-Jl. Gegerkalong; (25) Pasar Sederhana Sal. Cikalintu; (26) S. Cikapundung Kolot-belakang TSM; (27) S. Cibunut-Pasar Kosambi; (28) S. Cibunut-Baranangsiang; (29) Sal. Lebak larang-UNPAD; (30) Jl. Moch. Toha-Sal. Cipalasari/Sal. Ciateul; (31) S. Cirangrang; (32) Jl. Nilem; (33) Sal. Ciborete-Alamanda; (34) S. Cijalupang-Leger Jalan; (35) Jl. Cibodas-antapani; (36) Jl. A.H. Nasution S. Cikiley; (37) Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I; (38) Jl. Dian Molek-Sal. Cibuntu; (39) Jl. Sukamaju/Jl. Cikaso S. Cibeunying; (40) Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari;</p>
--	--	--	---	--	--

				<p>Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.</p>			<p>(41) Jl. Plered Sal. Antapani; (42) Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung; (43) SMA 9-Lapang Husen Sal. Cianting; (44) Sal. Ciharalang-S. Cidurian; (45) Jl. Ujung Beurung-Polresta Bandung Timur; (46) Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani-Jl. Jakarta; (47) Jl. Sumatra-SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa); (48) Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk; (49) Sal. Cikudapateuh-Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara; (50) Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung; (51) S. Cibeureum-Cigondewah/Gempolsari/Sudiplak; (52) Persimpangan Jl. Pasirkoja-Sal. Cilimus I; (53) Jl. Cibaduyut-Jl. Tol; (54) Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha; (55) Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta-Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga); (56) S. Ciroyom Jl. Kopo; (57) Simpang Jl. Jakarta-Jl. Kiaracandong; (58) Fly Over Jl. Cimindi; (59) Terusan Jl. Kiaracandong-Jl. Soekarno Hatta; (60) Sal. Cilimus Jl. Sukajadi; (61) S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga; (62) Sal. Mercuri Jl. Tata Surya</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

							dan#38; Jl. Mercuri; (63) Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih; (64) Sal. Rancabolang-Pasantren Jl. Rancabolang; (65) Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra; (66) S. Cipagalo; (67) S. Cipariuk; (68) Perumahan Riung Bandung.
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan DSDABM pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja			

				pelayanan publik yang diberikan DSDABM, yang diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat.			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Iku / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	90.61
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18.82
2	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91.18
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.40

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung

Tahun 2024

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Tahun 2025, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Nomor TL.01.02/1011-DSDABM/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung
Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	90.61	92.78	102.39
2	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18.85	21.53	114.22
3	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91.18	86.76	95.15
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.40	88.53	100.15

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Tingkat Kemantapan Jalan, dengan capaian kinerja 102.39%, pada indikator Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif, dengan capaian kinerja 114.22%, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100.15%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Pengurangan Titik Genangan, dengan capaian kinerja 95.15%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Renstra 2024-2026, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	90.61	92.78	102.39
2	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18.85	21.53	114.22
3	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91.18	86.76	95.15
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.40	88.53	100.15

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja dinas pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampai Target	75.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00
	Jumlah	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

3.3.1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

**Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Jalan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	95.00	95.01	100.01	90.61	92.78	102.39	95.00
2	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18.85	19.05	101.06	18.85	21.53	114.22	20.45

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu:

Realisasi kinerja nyata indikator pertama, yaitu Tingkat Kemantapan Jalan adalah sebesar 92.78 dari target sebesar 90.61 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102.39 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 Renstra 2024-2026, capaian kinerja indikator pertama, yaitu "Tingkat Kemantapan Jalan" tahun ini adalah sebesar 100.02%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kerjanya mencapai 107.62%.

Realisasi kinerja nyata indikator kedua, yaitu Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif adalah sebesar 21.53 dari target sebesar 18.85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 114.22%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator kedua, yaitu Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif tahun ini adalah sebesar 114.22%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kerjanya mencapai 112.55%.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Tingkat Kemantapan Jalan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan jalan ditinjau dari rasio antara panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah

ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

1. Tingkat kemantapan jalan

Panjang jalan mantap diperoleh dari penjumlahan panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang kondisi sedang yang diperoleh dari suvey kondisi jalan. panjang jalan keseluruhan mengacu pada keputusan walikota tentang status jalan di Kota Bandung.

2. Persentase panjang jalan yang memiliki Trotoar Inklusif

Panjang jalan yang memiliki Trotoar Inklusif dalam kondisi baik diperoleh dari realisasi pembangunan dan rehabilitasi Trotoar ditambah panjang ekisting Tahun sebelumnya. Panjang jalan keseluruhan mengacu pada keputusan Walikota Tentang status jalan di Kota Bandung.

C. Kinerja nyata dengan Rencana

1. Tingkat kemantapan jalan

Realisasi sebesar 92.78% melampaui target 90.61% dengan capaian sebesar 102.39%. Hal ini menunjukkan bahwa program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan berjalan lebih efektif dari yang diprediksi dalam perencanaan tahunan.

2. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif

Realisasi panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif hingga akhir tahun mencapai 21.53%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 18.85%. Dengan capaian sebesar 114,22%, hal ini menunjukkan bahwa target pembangunan trotoar inklusif Tahun 2025 telah berhasil diselesaikan dengan hasil yang melebihi rencana yang telah ditetapkan di awal.

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

1. Tingkat kemantapan jalan

Realisasi kemantapan jalan pada tahun 2025 sebesar 92.78% sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sempat menyentuh angka 95.01%. Meskipun secara administratif target tahun 2025 dinyatakan tercapai karena target diturunkan menjadi 90.61%, namun secara nyata kondisi kemantapan jalan justru menyusut sebesar 2.23% dibandingkan tahun lalu, sehingga diperlukan evaluasi terkait efektivitas pemeliharaan rutin agar standar kualitas jalan tidak terus menurun.

2. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif

Realisasi trotoar inklusif pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dimana angkanya naik dari 19.05% pada tahun 2024 menjadi 21.53%. Kinerja ini membuktikan adanya keberhasilan dalam mempercepat pembangunan fasilitas ramah disabilitas, karena selain melampaui target yang ditetapkan, DSDABM juga meningkatkan capaian sebesar 2,48% dibandingkan tahun sebelumnya.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

1. Tingkat kemantapan jalan

Realisasi tingkat kemantapan jalan sebesar 92.78% telah melampaui target 90.61%. Namun, jika dibandingkan dengan kemantapan jalan provinsi di Kota Bandung yang mencapai 100% pada Semester 2 Tahun 2025, masih terdapat selisih sebesar 7.22%. Hal ini menjadi dasar bagi DSDABM untuk terus meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan agar dapat setara dengan capaian kemantapan jalan provinsi di Kota Bandung.

2. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif

Kinerja sasaran "Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif" tidak dapat dibandingkan dengan kinerja instansi lainnya karena hanya diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di Kota Bandung.

F. Output Program/Kegiatan/Anggaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7		12		14 = 13 / 5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan					209.935.531.768		185.183.623.879		60,31	
	Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kondisi Jalan		2,64	128.412.218.170	3,78	114.089.270.616	146,26	55,90	
	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Bidang Jalan dan Jembatan	persen	100,00	128.412.218.170	100,00	114.089.270.616	200,00	55,90	
	Pengelolaan Leger Jalan sesuai NSPK	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	2,00	305.865.218	2,00	281.862.300	66,67	71,54	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan sesuai NSPK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	25,00	3.147.986.228	44,00	2.914.579.485	116,67	84,06	
	Pembangunan Jalan sesuai NSPK	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Bidang Jalan dan Jembatan	km	0,08	1.400.000.000	0,08	1.244.446.279	20,17	30,27	
	Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai NSPK	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Bidang Jalan dan Jembatan	km	26,00	113.426.465.823	37,23	102.946.265.014	52,31	57,24	
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai NSPK	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Bidang Jalan dan Jembatan	km	26,00	5.648.452.113	33,81	3.106.370.575	164,61	44,25	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai NSPK	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Bidang Jalan dan Jembatan	km	705,55	1.254.021.390	1.953,61	1.245.721.365	98,61	91,68	
	Rehabilitasi Jembatan sesuai NSPK	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Bidang Jalan dan Jembatan	jembatan	2,00	3.229.427.400	5,00	2.350.025.598	47,62	60,79	
	Rehabilitasi Jalan sesuai NSPK	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Bidang Jalan dan Jembatan	km	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Jembatan sesuai NSPK	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun Bidang Jalan dan Jembatan	jembatan	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Trotoar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif		18,85	42.004.101.613	21,53	36.953.083.542	198,42	66,38	
	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas trotoar	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Trotoar Bidang Drainase dan Trotoar	persen	100,00	42.004.101.613	97,20	36.953.083.542	197,20	66,38	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Trotoar sesuai NSPK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Bidang Drainase dan Trotoar	Dokumen	12,00	1.002.078.955	12,00	954.660.900	55,56	58,10	
	Pembangunan Trotoar sesuai NSPK	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Bidang Drainase dan Trotoar	km	5,55	13.483.700.107	5,73	12.565.404.112	105,04	85,81	
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar sesuai NSPK	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Bidang Drainase dan Trotoar	km	14,74	1.352.372.750	15,10	1.245.029.800	135,11	66,57	
	Survey Kondisi Trotoar sesuai NSPK	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Bidang Drainase dan Trotoar	km	300,00	298.122.135	383,43	292.618.200	43,27	29,51	
	Rehabilitasi Trotoar sesuai NSPK	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Bidang Drainase dan Trotoar	km	9,19	22.218.229.063	9,37	20.763.652.825	82,54	59,44	
	Pemeliharaan Berkala Trotoar sesuai NSPK	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Bidang Drainase dan Trotoar	km	9,09	3.649.598.603	10,24	1.131.717.705	69,77	106,66	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan		100,00	39.519.211.985	96,09	34.141.269.721	199,63	71,61	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi		100,00	142.697.845	100,00	139.943.250	33,33	60,44	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian bahan konstruksi pekerjaan jalan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	paket	100,00	142.697.845	100,00	139.943.250	66,67	60,44	
	Pengujian Bahan Konstruksi sesuai NSPK	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi	paket	100,00	142.697.845	100,00	139.943.250	66,67	60,44	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Penyelenggaraannya UPT Laboratorium Bahan Konstruksi								
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Bojonegara		100,00	4.459.462.052	100,00	3.850.164.358	33,33	75,18	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Bojonegara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara	km	9,36	4.459.462.052	9,36	3.850.164.358	66,63	75,18	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Bojonegara	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	km	16,50	4.459.462.052	16,50	3.850.164.358	121,24	75,18	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Cibeunying		100,00	5.959.345.919	100,00	5.266.600.391	33,33	89,14	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Cibeunying	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying	km	7,79	5.959.345.919	7,79	5.266.600.391	66,14	89,14	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Cibeunying	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	km	19,50	5.959.345.919	19,50	5.266.600.391	169,11	89,14	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Gedebage		100,00	5.397.131.317	100,00	4.675.154.552	33,33	72,30	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Gedebage	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage	km	5,74	5.397.131.317	5,74	4.675.154.552	66,61	72,30	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Gedebage	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	km	21,00	5.397.131.317	21,00	4.675.154.552	269,82	72,30	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Karees		100,00	5.716.998.029	100,00	5.021.891.185	33,33	73,69	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Karees	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Karees UPTD Operasional Pemeliharaan Karees	km	12,29	5.716.998.029	12,29	5.021.891.185	66,72	73,69	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Karees	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Karees UPT Karees	km	20,20	5.716.998.029	20,20	5.021.891.185	112,97	73,69	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Tegallega		100,00	4.768.665.735	119,29	4.102.372.435	39,76	73,13	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Tegallega	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega	km	5,84	4.768.665.735	25,23	4.102.372.435	221,38	73,13	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Tegallega	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	km	21,15	4.768.665.735	25,23	4.102.372.435	271,53	73,13	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD OP Ujungberung		100,00	5.321.761.358	109,41	4.592.285.686	36,47	73,80	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT OP Ujungberung	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung	km	6,97	5.321.761.358	6,97	4.592.285.686	117,27	73,80	
	Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai NSPK pada UPTD OP Ujungberung	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	km	32,00	5.321.761.358	35,01	4.592.285.686	287,36	73,80	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan pada UPTD Produksi Campuran Aspal		100,00	7.753.149.731	40,00	6.492.857.864	13,33	58,45	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPT PCA	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang direhabilitasi lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal UPTD Produksi Campuran Aspal	km	4,20	7.753.149.731	1,68	6.492.857.864	38,00	58,45	
	Rehabilitasi Jalan sesuai NSPK	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi UPT Produksi Campuran Aspal	km	4,20	7.753.149.731	1,68	6.492.857.864	30,22	58,45	

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan didukung dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) sasaran kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sasaran subkegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 209.935.531.768, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 185.183.623.879 atau dengan serapan 88,21%.

G. Faktor pendukung

H. Faktor Penghambat

UPTD:

- Harga satuan Aspal dan Bahan Bakar Pelumas di DPA yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran dan harga standar Pertamina saat ini sehingga terdapat sisa anggaran.
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sistem pengupahan berdasarkan OH jadi apabila tidak hadir maka upah akan disesuaikan dengan jumlah kehadiran.
- Sisa anggaran merupakan selisih penawaran/nego pada saat proses pengadaan dari Pagu ke Kontrak.
- Adanya fluktuasi harga satuan (BBM)
- Keterlambatan waktu pengesahan anggaran perubahan
- Perubahan metode pengadaan

Bidang Jalan dan Jembatan

- Terdapat beberapa nilai penawaran yang diajukan oleh penyedia terlalu rendah sebesar $\pm 80\%$ dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- Kuantitas pekerjaan di lapangan mengalami penyesuaian, sehingga menyebabkan adanya pengurangan terhadap nilai hasil pekerjaan.

Bidang Drainase dan trotoar:

- Terdapat efisiensi pembelanjaan paket pekerjaan dari nilai pagu terhadap kontrak terutama dari paket pekerjaan Lelang.
- Adanya penolakan masyarakat pada beberapa paket pekerjaan.

Beberapa paket pengadaan tidak dapat dilakukan karena dianggarkan pada anggaran perubahan yang baru disahkan pada bulan oktober maka tidak dapat dibelanjakan karena barang yang tersedia di E-Catalog harus melalui Pre-Order selama 90 hari sehingga melewati batas akhir kontrak dan terdapat paket pengadaan yang harga survei barangnya melebihi harga satuan di DPA.

I. Solusi

UPTD:

- Perhitungan HOK lebih akurat lagi
- Pengusulan penyesuaian Harga satuan Aspal dan Bahan Bakar Pelumas di DPA di SIPD
- Mencari penyedia atau vendor yang memberikan harga kompetitif namun tetap efektif dan efisien
- Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan melakukan berbagai percepatan pengadaan
- Melakukan asistensi serta koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bidang Jalan dan Jembatan

- Pencegahan penawaran penyedia yang terlalu rendah dilakukan melalui penyusunan HPS yang akurat dan berbasis harga pasar riil, penjelasan teknis pekerjaan yang jelas pada saat aanbidding, serta penerapan evaluasi kewajaran harga secara ketat. Langkah ini bertujuan memastikan penawaran yang diajukan tetap rasional dan dapat menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan pekerjaan untuk mengantisipasi potensi ketidaksesuaian kuantitas di lapangan dan melakukan langkah korektif agar realisasi belanja tetap optimal.

Bidang Drainase dan trotoar:

- Mendorong Pokja Pengadaan lebih cermat dalam menentukan pemenang lelang

Lebih cermat dalam menanggapi ajuan masyarakat, ruas yang diajukan belum tentu menjadi ruas yang dikerjakan.

3.3.2. Sasaran 2 Berkurangnya Genangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Berkurangnya Genangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91.18	89.71	98.39	91.18	86.76	95.15	100.00

Sasaran Berkurangnya Genangan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengurangan Titik Genangan adalah sebesar 86.76% dari target sebesar 91.18% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95.15%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Target 91.18% merupakan penyelesaian 62 titik genangan dari 68 titik genangan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hingga akhir periode hanya pada 59 titik genangan yang berhasil diselesaikan, sehingga realisasi berada pada angka 86.76%.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 Renstra 2024-2026, capaian kinerja indikator Persentase Pengurangan Titik Genangan tahun ini adalah sebesar 95.15%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kerjanya mencapai 86.76%.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Persentase Pengurangan Titik Genangan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Berkurangnya Genangan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan infrastruktur SDA dan Sistem Drainase Perkotaan ditinjau dari rasio antara jumlah titik genangan terselesaikan (memenuhi kriteria keberhasilan) terhadap total jumlah titik genangan yang telah ditetapkan sebanyak 68 titik. Kriteria keberhasilan pengurangan titik genangan adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dengan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 60 menit. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Jumlah titik genangan terselesaikan sesuai kriteria keberhasilan diperoleh berdasarkan laporan kejadian genangan yang tercatat selama periode pengukuran. Jumlah titik genangan yang telah ditetapkan sebanyak 68 titik masih mengacu pada data yang sudah ditetapkan sejak periode RPJMD 2008-2013. Hal ini didasari pada fakta bahwa masih terdapat titik genangan yang belum tuntas dari ke 68 titik ini.

Dengan formulasi perhitungan jumlah titik genangan terselesaikan sesuai kriteria keberhasilan/jumlah titik genangan yang telah ditetapkan (68 titik) x 100%.

C. Kinerja nyata dengan Rencana

Pada Triwulan 4, target untuk sasaran berkurangnya titik genangan ditetapkan sebesar 91.18% dan realisasi yang berhasil dicapai adalah 86.76%, sehingga capaian kinerja pada tahun ini adalah 95.15%. Dengan demikian, indikator Persentase Pengurangan Titik Genangan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana titik genangan yang ditargetkan selesai sebanyak 62 titik, namun sampai akhir periode 2025 hanya 59 titik yang terselesaikan. Tidak tercapainya target pengurangan titik genangan berdasarkan data pengukuran adalah karena kembali terjadinya genangan dengan tinggi > 30 cm dan durasi > 60 menit.

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja pengurangan titik genangan pada tahun ini mengalami penurunan dengan target yang ditetapkan dalam dua tahun terakhir tetap sama, yaitu sebesar 91,18%, namun realisasi menurun dari 89,71% pada tahun 2024 menjadi 86,76% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan banjir atau genangan mengalami kendala di tahun ini, sehingga hasil yang dicapai belum sama ataupun melampaui capaian pada tahun sebelumnya.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Kinerja sasaran berkurangnya genangan dengan indikator persentase penurunan titik genangan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja instansi lainnya karena hanya diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di Kota Bandung.

F. Output Program/Kegiatan/Anggaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
	Sasaran 2 Berkurangnya Genangan				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kapasitas Resapan Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kapasitas Resapan Air		-	151.833.206.189		145.438.033.573		69,30	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Resapan Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Resapan Air Terlaksana Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	persen	100,00	14.564.256.714	100,00	14.282.974.004	200,00	90,64	
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur peningkatan kapasitas aliran sungai sesuai NSPK	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Dokumen	12,00	509.456.885	12,00	504.521.750	66,67	85,05	
	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air sesuai NSPK	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Unit	9,00	4.665.134.636	9,00	4.620.605.705	120,83	64,58	
	Pemeliharaan Sumur Resapan/Imbuhan sesuai NSPK	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Titik	75,00	1.022.926.966	75,00	951.432.078	675,00	63,33	
	Pembangunan Sumur Resapan/Imbuhan sesuai NSPK	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Titik	32,00	7.833.905.697	32,00	7.679.871.480	143,59	150,35	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas Resapan Air sesuai NSPK	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	Dokumen	12,00	532.832.530	6,00	526.542.991	50,00	45,74	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kapasitas Parkir Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kapasitas Parkir air (Kolam Retensi)		84,28	14.871.386.178	84,27	13.378.159.713	120,41	50,44	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Parkir Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Parkir Air Terlaksana Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	persen	100,00	14.871.386.178	100,00	13.378.159.713	197,97	50,44	
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur parkir air sesuai NSPK	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Dokumen	2,00	-	2,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Peningkatan Polder/Kolam Retensi sesuai NSPK	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Unit	2,00	363.141.000	2,00	353.126.419	50,00	82,18	
	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi sesuai NSPK	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Unit	2,00	348.032.426	2,00	281.678.100	50,00	65,91	
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi sesuai NSPK	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Unit	2,00	13.537.200.000	2,00	12.254.318.000	100,00	111,39	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas Parkir Air sesuai NSPK	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Dokumen	5,00	623.012.753	5,00	489.037.194	166,67	68,10	
	Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kapasitas Saluran Aliran Sungai		100,00	68.035.138.931	100,00	65.578.794.450	128,27	82,75	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terbangun dan Terpeliharanya Infrastruktur Pengendali Banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengendali Banjir Terlaksana Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	persen	100,00	68.035.138.931	172,41	65.578.794.450	234,17	82,75	
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir sesuai NSPK	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Unit	2,00	12.362.553.792	2,00	11.617.639.377	166,67	94,72	
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir sesuai NSPK	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Dokumen	20,00	2.165.678.212	29,00	2.047.689.200	38,49	68,92	
	Normalisasi/Restorasi Sungai sesuai NSPK	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	km	4,00	2.500.000.000	14,33	2.047.500.653	175,17	56,71	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Dokumen	1,00	-	-	-	33,33	77,56	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai sesuai NSPK	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Dokumen	22,00	1.743.268.690	22,00	1.657.803.570	38,22	49,41	
	Rehabilitasi Tanggul Sungai Sesuai NSPK	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	km	2,40	47.237.564.738	12,61	46.578.319.300	226,11	91,00	
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir sesuai NSPK	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	Unit	20,00	2.026.073.498	21,00	1.629.842.350	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Kapasitas Saluran Drainase		28,68	34.359.781.094	28,68	32.584.137.573	84,64	79,33	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
	Meningkatnya cakupan jaringan sistem drainase perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan drainase perkotaan beroperasi dengan baik Bidang Drainase dan Trotoar	Meter	282.349,64	34.359.781.094	282.349,24	32.584.137.573	85,73	79,33	
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase sesuai NSPK	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis Bidang Drainase dan Trotoar	Meter	18.585,00	1.098.843.244	15.409,00	1.034.003.650	161.142,60	71,68	
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan sesuai NSPK	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya Bidang Drainase dan Trotoar	Dokumen	1,00	597.133.380	1,00	588.422.100	66,67	228,88	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan sesuai NSPK	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi Bidang Drainase dan Trotoar	Meter	14.657,00	24.379.501.095	14.925,40	23.095.020.847	107,19	87,74	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan sesuai NSPK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Bidang Drainase dan Trotoar	Meter	3.928,00	6.533.579.880	3.945,10	6.194.413.176	82,05	59,17	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Drainase sesuai NSPK	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun Bidang Drainase dan Trotoar	Dokumen	8,00	1.750.723.495	8,00	1.672.277.800	66,67	66,08	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase		100,00	11.798.681.200	134,98	11.460.938.774	234,98	59,47	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Bojonegara		100,00	1.695.713.755	100,00	1.634.970.828	33,33	54,88	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Bojonegara	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan	Meter	20.000,00	1.695.713.755	20.000,00	1.634.970.828	57,62	54,88	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bojonegara UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara								
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Bojonegara	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	Unit	250,00	332.243.676	258,00	324.715.908	69,20	58,07	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Bojonegara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	Meter	20.000,00	1.363.470.079	20.000,00	1.310.254.920	57,82	54,23	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Cibeunying		100,00	2.313.709.706	100,00	2.229.245.287	33,33	55,16	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Cibeunying	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying	Meter	21.000,00	2.313.709.706	21.000,00	2.229.245.287	66,67	55,16	
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Cibeunying	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	Unit	250,00	369.683.159	250,00	364.168.411	66,67	64,75	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Cibeunying	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	Meter	21.000,00	1.944.026.547	21.000,00	1.865.076.876	66,67	53,56	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Gedebage		100,00	1.622.523.883	100,00	1.545.130.564	33,33	63,54	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Gedebage	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage	Meter	25.000,00	1.622.523.883	25.000,00	1.545.130.564	66,67	63,54	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		Daerah Kabupaten/Kota									
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Gedebage	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	Unit	250,00	341.185.556	300,00	326.457.781	73,33	61,68	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Gedebage	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	Meter	25.000,00	1.281.338.327	27.789,00	1.218.672.783	62,06	64,09	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Karees		100,00	2.169.644.995	100,00	2.143.166.887	33,33	61,61	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Karees	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Karees UPTD Operasional Pemeliharaan Karees	Meter	22.000,00	2.169.644.995	22.000,00	2.143.166.887	85,71	61,61	
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Karees	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Karees UPT Karees	Unit	250,00	323.512.728	250,00	322.637.423	61,20	60,45	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Karees	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Karees UPT Karees	Meter	22.000,00	1.846.132.267	22.000,00	1.820.529.464	85,71	61,82	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Tegallega		100,00	1.940.792.836	128,28	1.888.371.536	42,76	58,64	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Tegallega	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega	Meter	18.000,00	1.940.792.836	23.091,00	1.888.371.536	92,29	58,64	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		Daerah Kabupaten/Kota									
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Tegallega	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	Unit	250,00	347.565.250	253,00	338.494.521	75,73	62,43	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Tegallega	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	Meter	18.000,00	1.593.227.586	23.091,00	1.549.877.015	92,29	57,93	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase pada UPTD OP Ujungberung		100,00	2.056.296.025	281,57	2.020.053.672	93,86	65,10	
	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan pada UPTD OP Ujungberung	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung	Meter	18.000,00	2.056.296.025	50.683,00	2.020.053.672	127,99	65,10	
	Pembuatan Sumur Resapan Dangkal / Drum Pori sesuai NSPK pada UPTD OP Ujungberung	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	Unit	250,00	347.587.070	311,00	346.350.525	76,00	63,72	
	Pemeliharaan Rutin Drainase sesuai NSPK pada UPTD OP Ujungberung	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	Meter	18.000,00	1.708.708.955	22.663,00	1.673.703.147	77,93	65,41	
	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA		100,00	8.203.962.072	100,00	8.153.029.059	200,00	63,52	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA UPTD Daerah Aliran Sungai	persen	100,00	8.203.962.072	100,00	8.153.029.059	200,00	63,52	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sesuai NSPK	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara UPT Daerah Aliran Sungai	km	45,00	8.203.962.072	45,00	8.153.029.059	0,06	63,52	

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan didukung dengan 6 (dua) Program, 5 (lima) sasaran kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sasaran subkegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 151.833.206.189, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 145.438.033.573 atau dengan serapan 95,79%.

G. Faktor pendukung

H. Faktor Penghambat

UPTD:

- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sistem pengupahan berdasarkan OH jadi apabila tidak hadir maka upah akan disesuaikan dengan jumlah kehadiran.
- Sisa anggaran merupakan selisih penawaran/nego pada saat proses pengadaan dari Pagu ke Kontrak.
- Adanya fluktuasi harga satuan (BBM)
- Keterlambatan waktu pengesahan anggaran perubahan
- Perubahan metode pengadaan

Bidang PDRA:

Adanya SILPA/Selisih dikarenakan sisa dari selisih nilai kontrak dan pagu anggaran

Bidang PSDA:

- Faktor penurunan nilai pada Engineering estimate yang telah di buat pada perencanaan pembangunan fisik
- Faktor penurunan nilai HPS, Penawaran, dan nilai kontrak pada perencanaan pembangunan fisik dan pengadaan.

Bidang Drainase dan trotoar:

- Terdapat efisiensi pembelanjaan paket pekerjaan dari nilai pagu terhadap kontrak terutama dari paket pekerjaan Lelang.
- Adanya penolakan masyarakat pada beberapa paket pekerjaan.

Beberapa paket pengadaan tidak dapat dilakukan karena dianggarkan pada anggaran perubahan yang baru disahkan pada bulan oktober maka tidak dapat dibelanjakan karena barang yang tersedia di E-Catalog harus melalui Pre-Order selama 90 hari sehingga melewati batas akhir kontrak dan terdapat paket pengadaan yang harga survei barangnya melebihi harga satuan di DPA.

I. Solusi

UPTD:

- Perhitungan HOK lebih akurat lagi
- Mencari penyedia atau vendor yang memberikan harga kompetitif namun tetap efektif dan efisien
- Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan melakukan berbagai percepatan pengadaan
- Melakukan asistensi serta koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bidang PDRA:

Semua pekerjaan dari masing-masing Sub Kegiatan pada bidang PDRA sudah terlaksana dan memenuhi target volume pekerjaan

Bidang PSDA:

Memaksimalkan perencanaan Engineering estimate dan pengadaan dengan aturan yang berlaku mendekati nilai pagu pada DPA yang telah di tetapkan.

Bidang Drainase dan trotoar:

- Mendorong Pokja Pengadaan lebih cermat dalam menentukan pemenang lelang
- Lebih cermat dalam menanggapi ajuan masyarakat, ruas yang diajukan belum tentu menjadi ruas yang dikerjakan.

3.3.3. Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.31	88.33	100.02	88.40	88.53	100.15	88.31

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 88.53 dari target sebesar 88.40 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.015 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 Renstra RPD 2024-2026, capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.15%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kinerjanya mencapai 100.25%.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan DSDABM, yang diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

IKM diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang diolah dalam aplikasi web e-SKM (skm.bandung.go.id).

C. Kinerja nyata dengan Rencana

Pada triwulan 4 telah ditetapkan target sebesar 88.40% dan realisasi sebesar 88.53%. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada triwulan ini telah mencapai target bahkan melampaui target dengan capaian 100.15%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah sesuai, bahkan sedikit melebihi ekspektasi masyarakat/penerima layanan.

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Realisasi IKM pada tahun 2025 sebesar 88.53% berhasil

melampaui realisasi tahun 2024 yang berada di angka 88.33%. Kenaikan sebesar 0.20% ini menunjukkan adanya konsistensi dan upaya berkelanjutan dari DSDABM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga dan terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id), nilai IKM DSDABM berada pada peringkat 49 dari 63 perangkat daerah/kewilayahan yang diukur. Nilai IKM DSDABM sebesar 88.53% berada di bawah nilai IKM Kota Bandung sebesar 89.89%.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian teknis infrastruktur (seperti kemantapan jalan yang melampaui target) dengan persepsi kepuasan masyarakat di lapangan. Meskipun secara fisik target tercapai, peringkat ini menjadi indikasi bahwa DSDABM perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat agar selaras dengan standar kualitas pelayanan perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

F. Output Program/Kegiatan/Anggaran

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					7		12		14 = 13 / 5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM				-	84.909.739.399		80.176.520.175		65,66	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,46	-	82,75	-	182,75	29,64	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00	84.909.739.399	100,00	80.176.520.175	200,00	65,66	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat		100,00	66.929.290.045	100,00	63.857.972.132	60,47	62,55	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sekretariat	persen	100,00	823.534.300	100,00	585.802.260	200,00	51,32	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen	6,00	744.964.360	6,00	567.064.260	72,22	55,45	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Laporan	5,00	78.569.940	5,00	18.738.000	66,67	27,46	
	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Sekretariat	persen	100,00	43.007.575.571	100,00	41.350.711.099	200,00	59,28	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	orang/bulan	188,00	43.007.575.571	772,00	41.350.711.099	15,50	59,28	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Sekretariat	persen	100,00	200.731.801	100,00	199.383.750	200,00	39,24	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai sesuai ketentuan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	-	-		-	200,00	30,11	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	3,00	200.731.801	3,00	199.383.750	200,00	40,90	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Sekretariat	persen	100,00	2.587.563.781	100,00	2.304.175.676	199,59	47,59	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai ketentuan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	1,00	109.489.391	1,00	108.632.203	100,00	60,84	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	4,00	801.868.487	4,00	796.614.935	266,67	64,63	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai ketentuan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	1,00	109.408.481	1,00	107.220.450	66,67	50,64	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai ketentuan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	4,00	536.748.302	4,00	482.812.307	233,33	59,69	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	paket	3,00	558.551.090	3,00	509.388.131	200,00	55,45	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	#N/A	204,00	-	204,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Laporan	12,00	352.285.584	12,00	218.929.750	66,67	23,91	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sesuai ketentuan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dokumen	1,00	96.485.196	1,00	58.500.000	5,56	40,01	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Sekretariat	persen	100,00	2.168.855.102	100,00	2.102.854.147	199,85	77,69	
	Pengadaan Mebel sesuai ketentuan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	2,00	488.280.581	2,00	480.008.400	166,67	91,37	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	112,00	1.680.574.521	112,00	1.622.845.747	8.800,00	74,67	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	persen	100,00	11.655.486.907	100,00	11.012.160.514	199,90	99,34	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pemerintahan daerah Sekretariat								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai ketentuan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Laporan	12,00	1.775.405.620	12,00	1.465.193.027	66,67	63,71	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai ketentuan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Laporan	12,00	9.880.081.287	12,00	9.546.967.487	66,67	113,27	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Sekretariat	persen	100,00	6.485.542.583	100,00	6.302.884.686	200,11	57,98	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	342,00	4.898.742.164	342,00	4.776.754.850	22.800,00	59,81	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	221,00	333.086.979	221,00	330.151.989	18.400,00	61,27	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai ketentuan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sekretariat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Unit	4,00	1.253.713.441	4,00	1.195.977.847	400,00	51,45	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Daerah Aliran Sungai		100,00	1.177.183.151	100,00	1.122.599.745	33,33	59,71	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	persen	100,00	229.441.631	100,00	226.559.880	200,00	62,42	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	paket	2,00	229.441.631	2,00	226.559.880	133,33	62,42	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	persen	100,00	803.772.922	99,99	753.296.085	199,99	59,67	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	paket	1,00	133.952.062	1,00	130.835.700	66,67	58,79	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai ketentuan pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	paket	1,00	39.534.000	1,00	19.163.000	66,67	37,18	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	paket	3,00	630.286.860	3,00	603.297.385	200,00	61,31	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Daerah Aliran Sungai	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai UPTD Daerah Aliran Sungai	persen	100,00	143.968.598	100,00	142.743.780	200,00	55,67	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	8,00	143.968.598	8,00	142.743.780	500,00	55,67	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
	ketentuan pada UPTD Daerah Aliran Sungai		Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai UPT Daerah Aliran Sungai								
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi		100,00	613.038.050	100,00	596.623.245	33,33	47,77	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	persen	100,00	42.174.024	100,00	41.824.800	200,00	54,47	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	paket	1,00	42.174.024	1,00	41.824.800	66,67	54,47	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	persen	100,00	40.056.365	100,00	39.541.995	200,00	78,94	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	paket	1,00	27.260.865	1,00	26.922.495	66,67	73,19	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPT	paket	1,00	12.795.500	1,00	12.619.500	66,67	97,86	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
			Laboratorium Bahan Konstruksi								
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	persen	100,00	530.807.661	100,00	515.256.450	200,00	46,28	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Unit	27,00	530.807.661	27,00	515.256.450	1.800,00	46,28	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Bojonegara		100,00	203.634.093	100,00	198.265.946	33,33	55,25	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD OP Bojonegara	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Bojonegara UPTD OP Bojonegara	persen	100,00	110.127.018	100,00	109.162.950	200,00	58,62	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Bojonegara	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	paket	1,00	110.127.018	1,00	109.162.950	66,67	58,62	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Bojonegara	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Bojonegara UPTD OP Bojonegara	persen	100,00	93.507.075	100,00	89.102.996	200,00	51,89	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Bojonegara	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	paket	1,00	32.344.675	1,00	31.827.696	66,67	37,92	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Bojonegara	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara UPT Bojonegara	paket	1,00	61.162.400	-	57.275.300	33,33	165,50	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Cibeunying		100,00	153.041.391	100,00	137.790.516	33,33	32,17	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD OP Cibeunying	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Cibeunying UPTD OP Cibeunying	persen	100,00	131.027.455	100,00	116.800.000	200,00	57,80	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Cibeunying	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	paket	1,00	131.027.455	1,00	116.800.000	66,67	57,80	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Cibeunying	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Cibeunying UPTD OP Cibeunying	persen	100,00	22.013.936	100,00	20.990.516	200,00	9,69	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Cibeunying	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	paket	1,00	17.424.918	1,00	16.401.498	66,67	7,96	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Cibeunying	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying UPT Cibeunying	paket	1,00	4.589.018	-	4.589.018	33,33	60,41	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Gedebage		100,00	236.008.399	100,00	234.583.940	33,33	53,66	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	persen	100,00	176.546.919	100,00	175.572.030	200,00	53,70	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perangkat daerah pada UPTD OP Gedebage		lingkup UPTD OP Gedebage UPTD OP Gedebage								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Gedebage	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	paket	1,00	176.546.919	1,00	175.572.030	100,00	53,70	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Gedebage	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Gedebage UPTD OP Gedebage	persen	100,00	59.461.480	100,00	59.011.910	200,00	53,53	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Gedebage	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	paket	1,00	50.711.480	1,00	50.261.910	66,67	70,20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Gedebage	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage UPT Gedebage	paket	2,00	8.750.000	1,00	8.750.000	66,67	37,00	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Karees		100,00	163.634.203	100,00	162.056.647	33,33	62,31	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD OP Karees	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Karees UPTD OP Karees	persen	100,00	116.622.319	100,00	116.121.984	200,00	56,74	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Karees	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Karees UPT Karees	paket	1,00	116.622.319	1,00	116.121.984	66,67	56,74	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Karees	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Karees UPTD OP Karees	persen	100,00	47.011.884	100,00	45.934.663	200,00	98,19	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Karees	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Karees UPT Karees	paket	1,00	35.818.884	1,00	35.412.663	66,67	98,14	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Karees	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Karees UPT Karees	paket	1,00	11.193.000	1,00	10.522.000	66,67	98,34	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Tegallega		100,00	266.237.599	100,00	263.780.000	33,33	81,51	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD OP Tegallega	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Tegallega UPTD OP Tegallega	persen	100,00	153.274.063	100,00	152.217.630	200,00	75,15	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Tegallega	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	paket	1,00	153.274.063	1,00	152.217.630	66,67	75,15	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Tegallega	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Tegallega UPTD OP Tegallega	persen	100,00	112.963.536	100,00	111.562.370	200,00	98,11	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Tegallega	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	paket	1,00	42.973.173	1,00	42.397.560	66,67	62,92	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Tegallega	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega UPT Tegallega	paket	1,00	69.990.363	1,00	69.164.810	66,67	230,08	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD OP Ujungberung		100,00	245.859.889	100,00	243.438.650	33,33	70,75	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD OP Ujungberung	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Ujungberung UPTD OP Ujungberung	persen	100,00	141.811.797	100,00	141.441.750	200,00	61,75	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD OP Ujungberung	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	paket	1,00	141.811.797	-	141.441.750	33,33	61,75	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD OP Ujungberung	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Ujungberung UPTD OP Ujungberung	persen	100,00	104.048.092	100,00	101.996.900	200,00	97,18	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD OP Ujungberung	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	paket	1,00	33.805.166	-	32.547.975	33,33	106,30	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD OP Ujungberung	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung UPT Ujungberung	paket	1,00	70.242.926	1,00	69.448.925	66,67	93,63	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan		100,00	14.823.936.594	100,00	13.262.703.929	33,33	106,52	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPTD Peralatan dan Perbengkelan	persen	100,00	129.401.025	100,00	129.076.350	200,00	69,47	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPT Peralatan dan Perbengkelan	paket	1,00	129.401.025	1,00	129.076.350	66,67	69,47	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPTD Peralatan dan Perbengkelan	persen	100,00	42.889.311	50,00	42.113.465	150,00	25,46	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPT Peralatan dan Perbengkelan	paket	1,00	28.904.311	1,00	28.173.465	66,67	21,13	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPT Peralatan dan Perbengkelan	paket	1,00	13.985.000	1,00	13.940.000	3.366,67	67,81	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPTD Peralatan dan Perbengkelan	persen	100,00	7.268.614.478	100,00	6.960.956.232	200,00	850,71	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPT	Unit	17,00	7.268.614.478	17,00	6.960.956.232	1.133,33	850,71	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
			Peralatan dan Perbengkelan								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan UPTD Peralatan dan Perbengkelan	persen	100,00	7.383.031.780	99,99	6.130.557.882	199,99	65,10	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPT Peralatan dan Perbengkelan	Unit	63,00	7.383.031.780	63,00	6.130.557.882	4.200,00	65,10	
	Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Produksi Campuran Aspal		100,00	97.875.985	100,00	96.705.425	33,33	50,15	
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada UPTD Produksi Campuran Aspal	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal UPTD Produksi Campuran Aspal	persen	100,00	67.296.646	-	66.369.120	100,00	45,95	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai ketentuan pada UPTD Produksi Campuran Aspal	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Produksi Campuran Aspal UPTD Produksi Campuran Aspal	paket	1,00	67.296.646	1,00	66.369.120	66,67	45,95	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Produksi Campuran Aspal	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal UPTD Produksi Campuran Aspal	persen	100,00	30.579.339	50,00	30.336.305	150,00	78,78	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai ketentuan pada UPTD Produksi Campuran Aspal	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Produksi Campuran	paket	1,00	25.579.339	1,00	25.336.305	100,00	78,95	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (suboutput)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		7		12		14 = 13 / 5 x 100%		15
			Aspal UPT Produksi Campuran Aspal								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai ketentuan pada UPTD Produksi Campuran Aspal	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Produksi Campuran Aspal UPT Produksi Campuran Aspal	paket	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	66,67	77,92	

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan didukung dengan 1 (satu) Program, 7 (tujuh) sasaran kegiatan, 55 (lima puluh lima) sasaran subkegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 84.909.739.399, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 80.176.520.175 atau dengan serapan 94,43%.

G. Faktor pendukung

H. Faktor Penghambat

- Harga satuan Aspal dan Bahan Bakar Pelumas di DPA yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran dan harga standar Pertamina saat ini sehingga terdapat sisa anggaran.
- Sisa anggaran merupakan selisih penawaran/nego pada saat proses pengadaan dari Pagu ke Kontrak.
- Adanya fluktuasi harga satuan (BBM)
- Keterlambatan waktu pengesahan anggaran perubahan
- Perubahan metode pengadaan
- Beberapa paket pengadaan tidak dapat dilakukan karena dianggarkan pada anggaran perubahan yang baru disahkan pada bulan oktober maka tidak dapat dibelanjakan karena barang yang tersedia di E-Catalog harus melalui Pre-Order selama 90 hari sehingga melewati batas akhir kontrak dan terdapat paket pengadaan yang harga survei barangnya melebihi harga satuan di DPA.

I. Solusi

- Pengusulan penyesuaian Harga satuan Aspal dan Bahan Bakar Pelumas di DPA di SIPD
- Mencari penyedia atau vendor yang memberikan harga kompetitif namun tetap efektif dan efisien
- Mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan melakukan berbagai percepatan pengadaan
- Melakukan asistensi serta koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3.3.4. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	EFISIENSI	EFEKTIVITAS
1	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	90,61	92,78	102,39	Program Penyelenggaraan Jalan	209.935.531.768	185.183.623.879	88,21	20,10%	122,78%
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	%	18,85	21,53	114,22						
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR			108,31	Total per sasaran						
2	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	%	91,18	86,76	95,15	Program Pengelolaan SDA	105.674.743.895	101.392.957.226	95,95	-0,64%	99,33%
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	46.158.462.294	44.045.076.347	95,42		
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			95,15	Total per sasaran	151.833.206.189	145.438.033.573	95,79			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,40	88,53	100,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	84.909.739.399	80.176.520.175	94,43	5,72%	106,06%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100,15	Total per sasaran	84.909.739.399	80.176.520.175	94,43			
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR			102,98	TOTAL KESELURUHAN	446.678.477.356	410.798.177.627	91,97	11,01%	111,97%	

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada sasaran strategis DSDABM menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi, dengan rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 102,98% dan tingkat efektifitas agregat mencapai 111,97%. Capaian tersebut diperoleh dengan realisasi anggaran sebesar 91,97% dari total pagu, yang mencerminkan tingkat efisiensi keseluruhan sebesar 11,01%. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan, efektifitas kinerja tergolong sangat tinggi, ditunjukkan oleh efektifitas sebesar 122,78% dengan realisasi anggaran 88,21% dari pagu. Tingkat efisiensi mencapai 20,10%, menandakan bahwa output kinerja dapat dicapai melampaui target meskipun terdapat sisa anggaran yang relatif signifikan. Rata-rata capaian dua indikator pada sasaran ini tercatat 108,31%, terutama didorong oleh kinerja persentase jalan dengan trotoar inklusif yang melampaui target. Sasaran Berkurangnya Genangan menunjukkan efektifitas yang mendekati target, dengan capaian kinerja indikator sebesar 95,15%. Realisasi anggaran mencapai 95,79% dari

pagu, sehingga ruang efisiensi relatif terbatas dan tercermin pada tingkat efisiensi negatif sebesar -0,64%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran hampir sebanding dengan capaian kinerja, tanpa kelebihan output yang signifikan, meskipun tingkat efektivitas masih berada pada level 99,33%. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM memperlihatkan kinerja yang efektif dan relatif efisien, dengan capaian indikator 100,15% dan realisasi anggaran 94,43% dari pagu. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,72% dan tingkat efektivitas sebesar 106,06%, yang menunjukkan bahwa target pelayanan berhasil dicapai dengan penggunaan anggaran yang masih terkendali. Secara ringkas, tabel menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi terjadi pada sasaran kualitas jalan, efektivitas paling stabil pada sasaran pelayanan, dan sasaran pengurangan genangan cenderung berada pada titik keseimbangan antara biaya dan capaian, dengan ruang perbaikan terutama pada peningkatan efektivitas kinerja.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 108,31%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.15%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.15%

Dalam kurun waktu 1 tahun/periode Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung telah menggunakan anggaran sebesar Rp 410.798.177.627 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Berdasarkan Pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung adalah 91.97% dari anggaran yang direncanakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

4.2. Saran

Bandung, 6 Januari 2026
Kepala Dinas

Sumber Daya Air Dan Bina Marga
Kota Bandung

Rizki Kusrulyadi, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197202291999011001